

**PEMBERDAYAAN EKONOMI SEBAGAI BENTUK PEMULIHAN
SETELAH PROSES PERADILAN TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menghadirkan paradigma baru dalam sistem pemulihan korban yang tidak lagi berfokus pada proses peradilan semata, melainkan juga mencakup pemulihan yang komprehensif dan berkelanjutan, salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberdayaan ekonomi sebagai bentuk pemulihan pasca-peradilan serta mengkaji keterkaitannya dengan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kriteria penerima pemberdayaan ekonomi serta bagaimana hubungan antara pemberdayaan ekonomi dan restitusi dalam kerangka pemulihan korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan ekonomi belum berjalan optimal akibat belum adanya pengaturan teknis yang jelas mengenai kriteria penerima manfaat serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Selain itu, pemberdayaan ekonomi dan restitusi masih berjalan secara parsial sehingga belum mampu memberikan pemulihan yang menyeluruh bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan integrasi kebijakan guna mewujudkan pemulihan korban yang efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: pemberdayaan ekonomi, pemulihan korban, restitusi, kekerasan seksual.

**PEMBERDAYAAN EKONOMI SEBAGAI BENTUK PEMULIHAN
SETELAH PROSES PERADILAN TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

ABSTRACT

Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence introduces a new paradigm in the victim recovery system, which is no longer solely focused on the judicial process but also encompasses comprehensive and sustainable recovery, one of which is through economic empowerment. This study aims to analyze the implementation of economic empowerment as a form of post-trial recovery and to examine its correlation with restitution for victims of sexual violence crimes. The issues addressed in this study are the criteria for recipients of economic empowerment and the relationship between economic empowerment and restitution within the framework of victim recovery. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the implementation of economic empowerment has not been optimal due to the absence of clear technical regulations regarding beneficiary criteria and the lack of coordination among relevant institutions. Furthermore, economic empowerment and restitution are still implemented separately, resulting in suboptimal recovery for victims. Therefore, it is necessary to strengthen regulatory frameworks and integrate policies to ensure effective, comprehensive, and sustainable victim recovery.

Keywords: *economic empowerment, victim recovery, restitution, sexual violence.*